



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2025
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i>	4.	<i>SATELIT NEWS</i>
2.	<i>BANTEN POS</i>	5.	<i>BANTEN RAYA</i>
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.	<i>Antara Banten</i> ✓

JANUARI	01	MEI	SEPTEMBER	2025
FEBRUARI		JUNI	OKTOBER	
MARET		JULI	NOVEMBER	
APRIL		AGUSTUS	DESEMBER	

BPK soroti dana BOS dan aset RSUD dalam LHP Pemprov Banten 2024

BPK meminta aset tersebut segera digunakan sebagai belanja pendukung layanan kesehatan, seperti obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman pasien, serta integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

"Segera memanfaatkan Aset Tetap Gedung dan Peralatan Medis pada RSUD Labuan dan RSUD Cilograng serta belanja pendukung pelayanan kesehatan berupa obat, BMHP, bahan makan dan minum pasien, serta SIMRS," ujar Bobby.

Pada sisi pendapatan, BPK juga mencatat belum optimalnya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi parkir di luar badan jalan yang berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan daerah. Untuk itu, BPK merekomendasikan pemutakhiran tarif retribusi layanan kesehatan dalam SIMRS sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Sebagai informasi, hingga 31 Desember 2024, Pemprov Banten telah menyelesaikan 1.544 dari 1.809 rekomendasi hasil pemeriksaan atau sebesar 85,35 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen.

"Saya minta Gubernur Banten terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Tentunya dengan berkoordinasi dan mengajak peran serta DPRD," kata Bobby.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan oleh Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi kepada Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim. dan Gubernur Banten Andra Soni.

Bobby juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Banten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.

"Prestasi ini hendaknya memotivasi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Bobby.